TUGAS FILSAFAT PANCASILA

**‘KASUS BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, KPK GELEDAG SEBUAH RUMAH
DI TANJUNGPINANGAN DIKAITKAN DENGAN TEORI SOEKARNO ’**

Dosen pengampu:

Dr.Agustinus W Dewantara, S.S.,M.Hum.

NAMA: EUPRASIA E'EN ENJELINA

NIM : 3903019029

FAKULTAS BISNIS

JURUSAN MANAJEMEN

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KAMPUS MADIUN
2019**

ABSTRAK

Korupsi adalah sikap atau tindakan seseorang yang melakukan penyelewengan atau menyalahgunakan kekuasaan atau keuangan kepada seseorang yang sudah diberi kepercayaan oleh: pemerintah, perusahaan, organisasi, kelompok, perkumpulan atau perserikatan dan lain-lain dengan menguntungkan diri sendiri.

Penyebab korupsi:

- Disebabkan karena ketamakan seseorang untuk mendapatkan harta benda atau fasilitas mewah demi kepentingan diri sendiri,
- Disebabkan seseorang untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan,
- Penyalahgunaan anggaran atau pengalih fungsian proyek tanpa ada andidum,
- Pengurangan volume proyek, dan
- Penggelapan uang proyek dan rakyat

STUDI KASUS

Tim penyelidik komisi pemberantas korupsi (KPK) menggeledah sebuah rumah di jalan Ir. Sutami, tanjungpinang timur, kepulauan riau. Penggeledahan itu terkait kepentingan penyelidik kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari pemerintah kabupaten kota warigin Timur. Adapun, tiga perusahab itu yakin, PT fajar mentaya Abadi, PT billly Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

Dalam kasus itu, kpk menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka.

“Tim KPK menggeledah sebuah rumh di jalan Ir. Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur. Sejauh ini telah diamankan ddokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT Fajar Mentaya Abadi,” Kata Juru Bicara KPK Febridiansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019).

Febri menyatakan, penggeledahan di rumah tersebut masih berjalan hingga sore ini.

Dalam kasus ini, perbuatan supian diduga telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat.

Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksid, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan tersebut.

Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi.

KPK tetapkan Bupati kotawaringin Timur, Supian Hadi sebagai tersangka korupsi terkait izin usaha pertambangan atau IUP. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laudi Syarif mengungkapkan bahwa telah menemukan kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara lebih besar dari kasus KTP. Elektronik terbesar Rp 2,3 triliun dan BLBI Rp 4,58 triliun. Kasus itu terkait penerbitan perizinan usaha pertambangan operasi produksi kepada 3 perusahaan oleh pemerintah kotawaringin Timur. Pada kasus ini diduga kerugian negara mencapai Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar Amerika. KPK menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh ketiga perusahaan dilingkungan kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2012. Dari hasil produksi pertambangan bauksit kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi.

PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi atau rasuah (bahasa latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum,
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

- Penggelapan dalam jabatan,
- Pemerasan dalam jabatan,
- Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- Menerima grafikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/ pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negara atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatan. Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara.

APA PENYEBAB DARI KORUPSI

Faktor-faktor penyebab korupsi

Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua. Yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing faktor tersebut memiliki beberapa poin-poin.

1. Faktor internal

Yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah:

- Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia

Pada sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi.

- Gaya hidup yang konsumtif.

Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros.

- Moral yang kurang kuat

Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri.

2. Faktor Eksternal

Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain:

- Politik

Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan berbagai korupsi.

- ekonomi

Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Faktor ekonomi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi diantaranya yaitu:

- Kultural atau budaya
- Pimpinan
- Akuntabilitas
- Manajemen atau sistem

ADAKAH KAITAN DEMOKRASI TERHADAP KORUPSI

Pengertian demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik. Politik adalah sistem atau tatanan hidup bersama. Dalam filsafat politik klasik, demokrasi bukan sistem tata hidup bersama yang ideal. Alasannya para filsuf klasi, menurut sokrates, negara akan berjalan tanpa orientasi pada hkum yang benar (simak Apology, dimana sokrates-walaupun bertindak benar-divonis mati oleh pengadilan yang demokratis!). tatanan hidup bareng yang demokratis memang memiliki, sebagai salah satu konsekuensinya, ''anarkisme rakyat'' sebagai sesuatu yang diberlakukan seakan-akan sebagai hukum.

Alasan yang lain: demokrasi menyembah altar ''kebebasab,'' (lawless) dan bukan kebenaran/kebijaksanaan/pengetahuan. Plato adalah penggagas sistem politik yang menakhtakan filsuf sebagai raja dengan tujuan mulia agar tata hidup bersama menghantar manusia-manusia kepada virtuous people (keadilan adalah harmony antara seluruh bagian elemen-elemen konstitutif negara). Aristoteles, meskipun kurang lebih setuju dengan plato mengenai tujuan tata hidup bersama, yaitu the good life, memandang demokrasi sebagai salah satu sistem yang tidak jelek. Demokrasi yang menggariskan pemerintahan oleh rakyat dapat menjadi baik apabila mendasarkan kewibawaan sistem pemerintahannya pada law (hukum).

Demokrasi sesungguhnya memiliki beberapa kelemahan yang sangat berbahaya apabila tidak diwaspadai. Pernyataan ini tidak hendak berkata bahwa demokrasi merupakan bentuk suatu pemerintahan yang inferior. Justru sebaliknya setiap upaya untuk melangkah ke demokrasi diperlukan pemahaman yang akurat mengenai beberapa kemungkinan penyalahgunaannya atas nama demokrasi.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh mayoritas. Pemerintahan mayoritas mengindikasikan disini konsep-konsep teoritis bagus seperti kekuasaan di tangan rakyat, dihindarkannya pemerintahan diktator, dikedepankannya hak-hak asasi dan kebebasan rakyat kebanyakan, dicegahnya bentuk pemerintahan monarkial tirani (pemerintahan oleh seorang raja yang tiran), dan seterusnya.

Dasar untuk demokrasi pancasila ala soekarno adalah ''semua buat semua''. Demokrasi seperti ini mengimplisitkan prinsip musyawarah dan bukannya suara terbanyak. Bagi suekarno, suara terbanyak justru akan melahirkan kesewenang-wenangan dan penindasan atas minoritas. Soekarno tidak lagi menyetujui penggunaan terminologi

minoritas-mayoritas dalam membangun tata demokrasi indonesia. Karena termologi itu lahir dari kultur liberal. Lebih dari itu, sebenarnya satu suara, bahkan yang berasal dari kelompok minoritas sekalipun, mempunyai arti yang sama bagi kehidupan bernegara.

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI

Korupsi bukanlah kata yang asing lagi ditelinga orang indonesia. Bahkan anak-anak pun telah mengerti apa itu korupsi. Korupsi memang bukan masalah yang baru di negeri tercinta ini. Kasus serta berita-berita tentang korupsi juga sepertinya sudah menjadi hal yang biasa untuk ditayangkan di televisi, maupun media cetak. Jika bicara masalah korupsi memang tiada ujungnya. Korupsi dan hukum sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat berhubungan erat, bisa jadi sebagai lawan, atau maenjadi kawan.

Korupsi di indonesia tak terhitung lagi jumlahnya. Mulai dari kasus yang sangat terkenal dulu yaitu ‘‘Gayus Tambunan’’, kasus ‘‘Hambalang’’, ‘‘Papa Minta Saham’’, dan kasus yang sangat heboh sekarang ini yaitu ‘‘KTP-el’’. Bahkan tindakan korupsi pada titik bawah justru sering kita dengar dan lihat, kadang juga pernah merasakannya. Seperti dalam pembuatan SIM, atau bahkan penyalahgunaan tugas dalam bekerja, mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala kelurahan, sekolah, guru, polisi, sampai profesi yang mempunyai peranan penting di keuangan negara ini. Begitu banyaknya kasus korupsi sehingga Indonesia mendapat predikat negara ke-4 terkorup di dunia`

Rentetan kasus korupsi yang yang seanebrek tentu saja dapat menghambat pembangunan di negara ini. Dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan rakyat indonesia justru dipakai dan dinikmati oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan atau kerap yang disebut koruptor.

Alhasil, kemiskinan yang merajalela selalu menjadi dampaknya. Dikarenakan korupsi merupakan faktor utama yang menghambat proses pembangunan berkelanjutan di indonesia, maka sudah saatnya pemberantasan korupsi menjadi seluruh lapisan masyarakat, terlebih pada remaja. Mengingat banyak sekali peranan yang dapat diperankan oleh remaja dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu ada 3 (tiga) strategi yang bisa dipergunakan oleh remaja jika ingin terlibat dalam gerakan-gerakan untuk memberantas korupsi, yakni:

1. Strategi preventif (pencegahan)

Yaitu untuk mencegah, dan dapat melakukan dengan: pertama, pastikan bahwa anda bukan pelaku korupsi. Ini dapat dilakukan dengan cara menolak segala pungutan yang

tidak resmi. (contoh: melakukan transaksi keuangan dengan tidak menggunakan kwitansi). Kemudian, lakukan kegiatan kampanye dan dakwah untuk mengajak masyarakat melawan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada korupsi.

2. Strategi detektif (deteksi)

Yaitu menyelidiki atau mencari tahu apabila terdapat tanda-tanda korupsi, bila dilakukan dengan: pertama, mengajak teman-teman membangun komunitas kecil disekolah dan buatlah diskusi rutin tentang rincian penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Kedua, lakukan pengumpulan data apabila ada tanda-tanda penyelewengan dana. Ketiga, lakukan penelusuran untuk mencari tahu sebagai bentuk pengelolaan keuangan. Keempat, menjalin komunikasi dengan guru-guru yang berwenang jika diduga terjadi penyelewengan anggaran.

3. Strategi edukatif

Cara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta menumbuhkan sikap antipati terhadap perlakuan yang mengarah kepada korupsi melalui pesan-pesan moral.

Tiga pilar strategi yang dijelaskan di atas pada intinya juga membutuhkan usaha keras serta dorongan dari pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat.

Jadi, korupsi adalah tindakan yang harus diberantas sesegera dan sedini mungkin karena dapat mengancam kesejahteraan masyarakat serta dapat berdampak buruk pada perkembangan dan pembangunan negara. Sehingga perlu peran semua lapisan masyarakat. Remaja adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai pengaruh signifikan dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

Upaya yang dapat dilakukan remaja adalah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di sekolah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Oleh karena itu, remaja harus mempunyai motivasi yang kuat untuk mencegah timbulnya korupsi agar upaya mereka berjalan dengan semaksimal mungkin. Jika generasi penerus bangsa bersih dari korupsi, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

APAKAH KORUPSI AKAN TERJADI LAGI

Korupsi di Indonesia tidak akan pernah hilang alasannya:

1. Korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya

Korupsi di Indonesia sejatinya sudah mengakar dengan kuat. Bahkan sebelum kata korupsi atau KKN jadi tenar saat pak Soeharto lengser, korupsi sudah hidup dan membumi di Indonesia. Di zaman-zaman kerajaan seperti Singasari, Majapahit hingga Demak. Korupsi sudah menyusup masuk dan akhirnya membuat kerajaan yang besar ini jadi hancur. Motifnya adalah sama. Memperkaya diri dan ingin mendapatkan kekuasaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya perangpun tak dapat dihindarkan.

Selain itu, saat zaman penjajahan Belanda. Korupsi mulai ditanamkan oleh bangsa yang sering disebut dengan kompeni ini. Mereka mengangkat petinggi-petinggi lokal lalu memberinya upeti. Selain itu mereka juga mengajarkan bagaimana mendapatkan uang dengan memeras rakyat dan memakai uang dari pemerintahan. Lambat laun budaya ini terus mengakar kuat. Bahkan sekarang korupsi telah menjelma menjadi sebuah pohon besar yang akan diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Tidak ada hukum yang mematikan

Wacana terkait adanya hukuman mati bagi koruptor pernah di gulirkan di Indonesia. Namun hal ini tidak pernah terjadi sampai sekarang. Alasannya adalah hukuman mati bagi koruptor dianggap tidak efektif. Meski demikian, jika hukuman ini tidak dilakukan. Maka koruptor akan semakin merajalela. Mereka akan terus mengeruk uang rakyat untuk kesenangan sendiri. Akhirnya negara merugi dan rakyat tak mendapatkan apa-apa.

3. Korupsi bukan perkara individu tapi sistem yang kuat

Korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh individu saja. Barangkali mereka memang ditangkap sendirian, namun dibalik itu ada sebuah sistem yang kuat. Ia memiliki banyak sekali backing orang-orang kuat hingga membuatnya mampu melakukan korupsi dengan skala yang sangat besar. Selain itu mereka juga bekerja dengan sangat rapi hingga ada pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor dan juga pihak yang rela mengorbankan tubuhnya.

4. Tidak ada upaya kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi

Kita bisa melihat jika pemerintah tidak begitu memperhatikan masalah korupsi. Bahkan lembaga yang dipercaya memberantas korupsi dibiarkan hancur.

5. Korupsi bukanlah akhir dari segalanya, hidup masih berjalan

Korupsi bukanlah akhir dari segalanya. Apalagi beberapa koruptor masih bisa hidup enak, dan nyaman didalam penjara. Koruptor masih bisa hidup selayaknya

selayaknya manusia hidup didalam penjara. Mereka masih bisa bermain ponsel, belanja, hingga makan enak. Ruang khususpun disediakan untuk membuat mereka nyaman. Inilah beberapa hal yang menyebabkan korupsi tidak berhenti di Indonesia. mereka menganggap jika korupsi hanya akan membuat mereka dipenjara. Keluar dari san masih bisa melakukan hal yang sama, bahkan jauh lebih besar. Jika saja melakukan korupsi merupakan akhir dari sebuah kehidupan. Maka mereka tidak akan memilih untuk mencuri uang rakyat.

Lima hal diatas adalah beberapa alasan mengapa korupsi tidak akan pernah hilang dari Indonesia. kita tak perlu berharap korupsi segera hilang. Berkurang sedikit saja sudah merupakan kemajuan yang sangat hebat!

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, Agustinus W..2017. *Alangkah Hebatnya Negara Gotong-Royong(Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: Kanisius
- Dewantara, Agustinus W.. 2017. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: Kanisius.